

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. Latar Belakang Eksistensi Proyek

Provinsi Papua Barat, seperti Provinsi Papua yang terletak di Pulau Papua, merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki status otonomi khusus.¹² Provinsi Papua Barat mendapatkan wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Wewenang khusus ini berarti sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Papua Barat memperoleh hak serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua Barat bagi kemakmuran rakyat Papua Barat itu sendiri. Salah satu hasil dari otonomi khusus ini adalah terbentuknya Majelis Rakyat Papua.

Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut MRP, adalah representasi kultural orang asli Papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak mereka sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pementasan kerukunan hidup beragama.³ Anggota MRP terdiri dari wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan yang adalah orang-orang asli Papua. Seperti Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat yang juga mendapatkan otonomi khusus memiliki wewenang dalam pembentukan Majelis Rakyat Papua Barat, yang selanjutnya disebut MRPB, bertempat di Kabupaten Manokwari sebagai ibukota dari Papua Barat.

Pada tahun 2015, Kantor Gubernur Papua Barat yang baru telah diresmikan.⁴ Kantor yang terletak di Distrik Katebu, Kec. Manokwari Selatan ini dibangun untuk menggantikan

¹ Pemerintah Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua*. Jakarta: Sekretariat Negara.

² Pemerintah Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua*. Jakarta: Sekretariat Negara.

³ Pemerintah Indonesia. (2004). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua*. Jakarta: Sekretariat Negara.

⁴ Redaksi Tempo. (2015, Oktober 19). *Kantor Gubernur Papua Barat Senilai Rp 445 M Diresmikan*. Diakses Februari 28, 2020, dari Tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/710837/kantor-gubernur-papua-barat-senilai-rp-445-m-diresmikan>

kantor gubernur yang lama di Distrik Manokwari Timur, Kec. Manokwari Barat. Tidak hanya kantor gubernur, instansi milik pemerintahan provinsi yang lainnya kemudian juga direncanakan akan direlokasikan di kompleks yang sama dengan tujuan agar seluruh instansi milik Provinsi Papua Barat dapat berkinerja secara optimal dalam satu daerah. Salah satu instansi yang diputuskan akan mengalami relokasi adalah gedung sekretariat MRPB, yang sebelumnya bertempat di lokasi kantor gubernur yang lama.

Sementara pengadaan relokasi masih dalam tahap perencanaan, pada Agustus 2019 lalu sempat terjadi kerusuhan di Manokwari yang berujung pada pembakaran gedung sekretariat milik MRPB.⁵ Kerusakan akibat pembakaran tersebut menjadikan kantor sudah tidak layak pakai, sehingga MRPB harus mengungsikan tempat kerja mereka di sebuah gedung baru yang sebelumnya akan digunakan sebagai Dinas Pertanian Papua Barat.⁶ Kejadian ini membuat pemerintah Papua Barat semakin terdorong untuk merampungkan rencana relokasi dan pembangunan gedung MRPB yang baru. Salah satu perwujudannya adalah berupa penyerahan proposal RAB ke Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, saat dirinya bertemu di Jakarta pada September 2019 silam.⁷

Sebagai ibukota Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari tidak memiliki banyak landmark. Salah satu landmark yang ada berupa Patung Yesus Kristus setinggi kurang lebih 30 meter di Pulau Mansinam. Keberadaan landmark itu sendiri lebih merujuk kepada sisi rohani Manokwari yang dijuluki sebagai “Kota Injil”.⁸ Landmark lainnya berupa Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat, yang merujuk pada status Kabupaten Manokwari sebagai pusat pemerintahan serta ibukota Provinsi Papua Barat. Kedua contoh landmark tadi secara eksplisit masih belum menyampaikan bahwa Kabupaten Manokwari sebagai ibukota Provinsi Papua Barat memiliki status otonomi khusus.

Sedikitnya landmark serta ketiadaan kantor sebagai sarana kerja ini menjadikan MRPB selaku instansi yang dibentuk berdasarkan status otonomi khusus di Provinsi Papua Barat layak untuk mendapatkan Gedung MRPB di Kabupaten Manokwari.

⁵ Redaksi detikNews. (2019, Agustus 23). *Polisi Buru Pelaku dan Provokator Pembakar Gedung MRP Manokwari*. Diakses Maret 6, 2020, dari detikNews: <https://news.detik.com/berita/d-4678677/polisi-buru-pelaku-dan-provokator-pembakar-gedung-mrp-manokwari>

⁶ Redaksi Kabar Papua. (2019, Agustus 24). *Pemprov Siapkan Kantor Sementara MRP dan DPR Papua Barat*. Diakses Maret 12, 2020, dari Kabar Papua: <https://kabarpapua.co/pemprov-siapkan-kantor-sementara-mrp-dan-dpr-papua-barat/>

⁷ Redaksi Kabar Papua. (2019, September 12). *Total Pembangunan Kantor MRP dan DPR Papua Barat Rp350 Miliar*. Diakses Maret 5, 2020, dari Kabar Papua: <https://kabarpapua.co/total-pembangunan-kantor-mrp-dan-dpr-papua-barat-rp350-miliar/>

⁸ Lestari, S. (2017, Juli 24). *Upaya menjadikan Manokwari sebagai 'Kota Injil' pertama di Indonesia*. Diakses Maret 6, 2020, dari BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40695899>

1.1.2. Latar Belakang Masalah

Sebagai kantor instansi milik pemerintahan provinsi, diperlukan sarana kerja yang dapat memaksimalkan kinerja penggunanya. Mewadahi banyaknya pengguna memerlukan sirkulasi yang efisien pada penataan tiap-tiap ruang dalam gedung kantor. Tidak hanya sebagai kantor, gedung juga harus dapat menampilkan massa yang berciri khas daerah yang direpresentasikan, terutama jika kantor tersebut merupakan instansi khusus. Maka dari itu, pendekatan arsitektural dari Gedung MRPB yang akan dirancang adalah Neo Vernakular.

Neo Vernakular adalah salah satu gaya arsitektur yang muncul di era post-modern, yang menggabungkan arsitektur tradisional dan arsitektur modern. Menurut Charles Jencks, karakteristik arsitektur Neo Vernakular terdiri dari: a) Selalu menggunakan atap; b) Batu bata (dalam kasus ini, elemen konstruksi lokal); c) Mengembalikan bentuk-bentuk tradisional yang ramah secara lingkungan dengan penekanan pada proporsi vertikal; d) Kesatuan antar interior terbuka melalui unsur modern dengan ruang terbuka di luar gedung; dan e) Warna yang kuat dan kontras.⁹

Papua, begitu pula Provinsi Papua Barat, memiliki identitas arsitektur tradisional yang sederhana. Kesederhanaan ini muncul karena para penghuninya masih pada taraf dimana mereka benar-benar memanfaatkan segala sesuatu yang disiapkan oleh alam. Contohnya Honai yang merupakan rumah adat tradisional Papua menggunakan bahan yang disediakan oleh alam, seperti dinding dari kulit kayu, tiang rumah dari kayu, atap dari daun kelapa/alang-alang, dan lantai dari kulit sagu. Desainnya pun juga sederhana, berupa ruang berbentuk lingkaran dengan diameter kurang lebih 5 meter serta atap berbentuk kerucut. Gaya arsitektur tradisional yang sederhana ini nantinya akan dipadukan dengan pendekatan arsitektur Neo Vernakular agar dapat mewujudkan Gedung MRPB yang ideal.

1.2. RUMUSAN PERMASALAHAN

Bagaimana wujud rancangan Gedung Majelis Rakyat Papua Barat di Manokwari melalui pengolahan tata ruang dalam dan bentuk massa dengan pendekatan Arsitektur Neo Vernakular Papua?

⁹ Jencks, C. A. (1991). *The Language of Post-Modern Architecture*. Milan: Rizzoli.

1.3. TUJUAN DAN SASARAN

1.3.1. Tujuan

Menghasilkan konsep rancangan Gedung Majelis Rakyat Papua Barat di Kabupaten Manokwari berupa landmark ikonik yang mampu mengakomodasi kebutuhan kantor penghuninya melalui pengolahan tata ruang dalam dan bentukan massa bangunan dengan pendekatan Arsitektur Neo Vernakular Papua.

1.3.2. Sasaran

- Mengkaji teori mengenai standar merancang gedung kantor dan penerapannya pada bangunan.
- Mengkaji teori mengenai pengolahan tata ruang dalam dan bentukan massa bangunan pada gedung kantor sekaligus landmark.
- Mengkaji teori mengenai penerapan Neo Vernakular yang dipadukan dengan Arsitektur Tradisional Papua.

1.4. LINGKUP STUDI

1.4.1. Lingkup Spasial

Gedung MRPB akan berlokasi di Kabupaten Manokwari yang merupakan ibukota sekaligus pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat. Tapak atau *site* yang akan digunakan berlokasi di kompleks yang sama dengan pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat yang lainnya. Ukuran tapak yang dibutuhkan adalah sekitar 15.000 m².

1.4.2. Lingkup Substansial

Pada Gedung MRPB, tatanan ruang dalam beserta massa bangunan menggunakan penerapan Neo Vernakular yang dipadukan dengan Arsitektur Tradisional Papua.

1.4.3. Lingkup Temporal

Diharapkan rancangan ini akan menjadi penyelesaian penekanan studi untuk kurun waktu 25 tahun.

1.5. METODE STUDI

1.5.1. Pola Prosedural

1. Metode Observasi

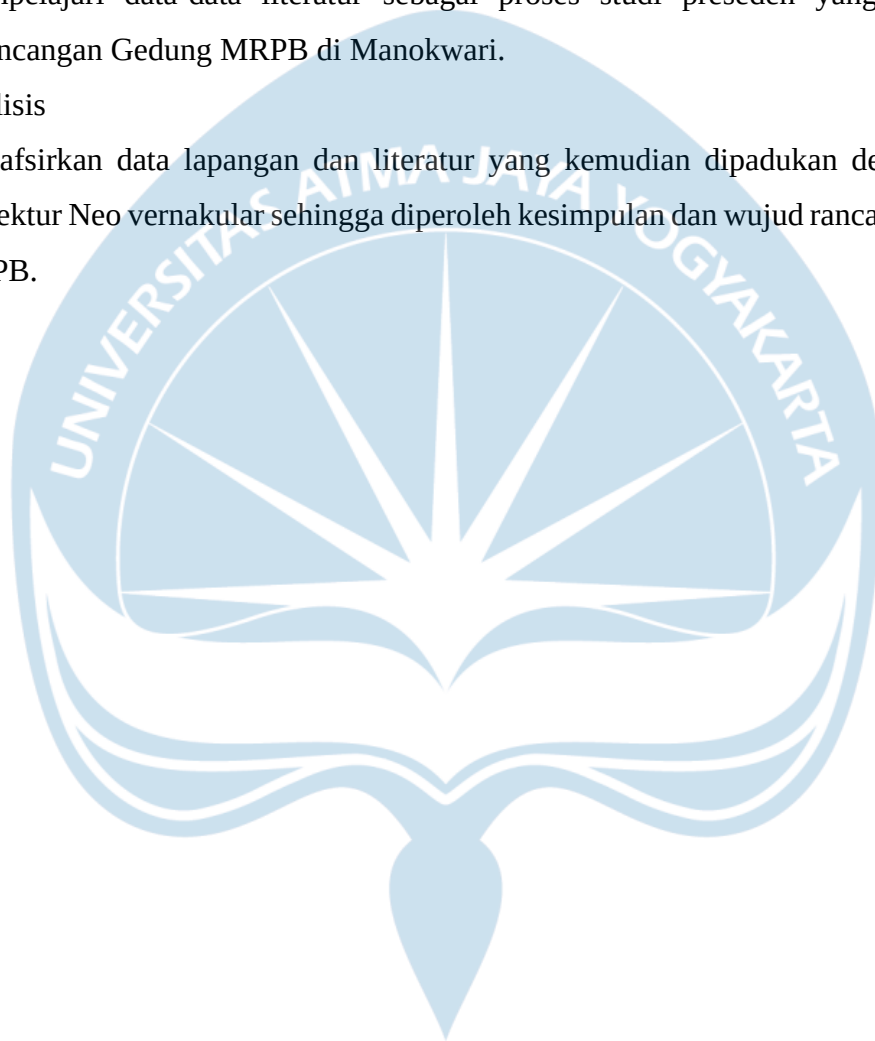
Mengumpulkan data-data dan informasi terkait dengan gedung kantor pemerintahan.

2. Metode Literatur

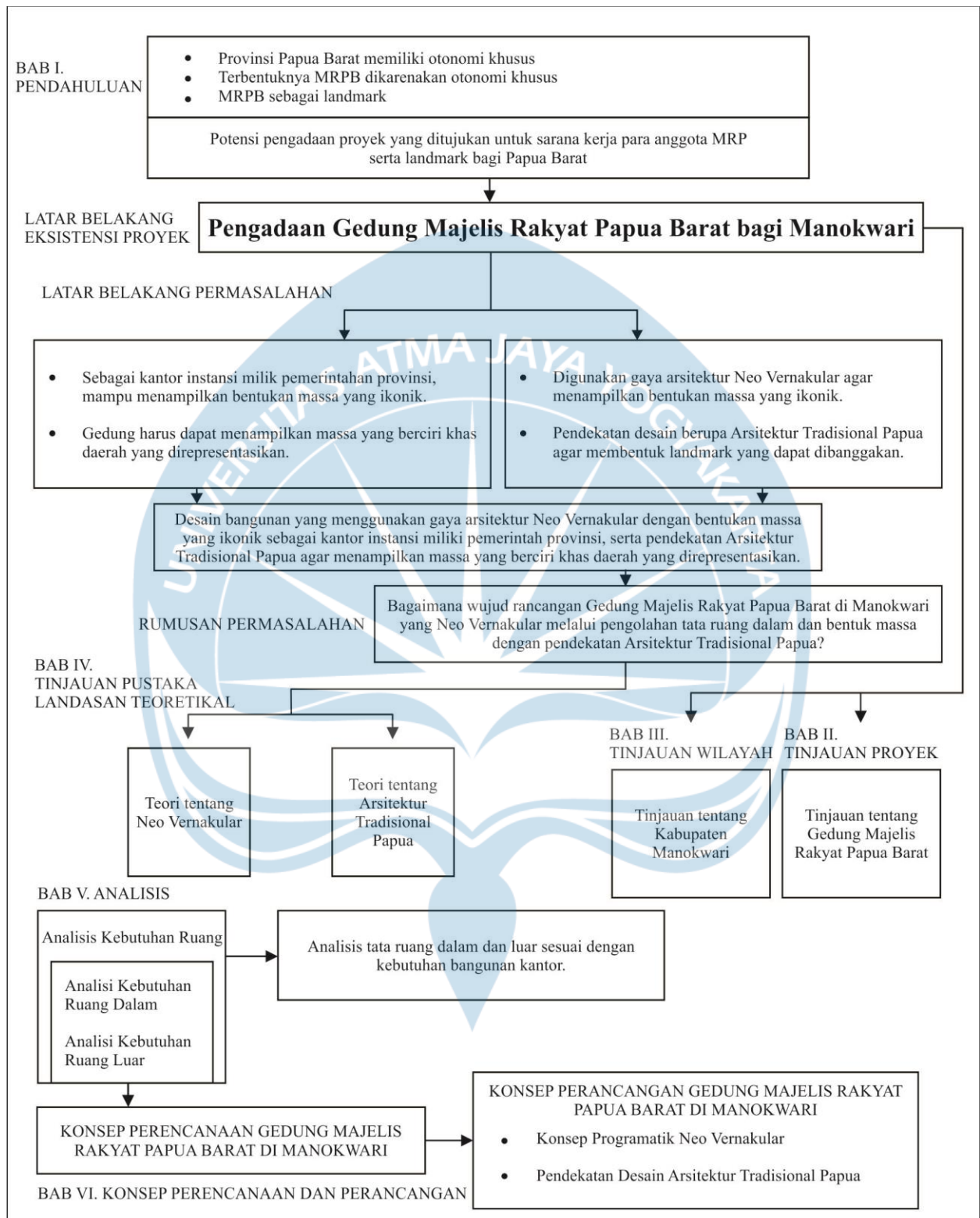
Mempelajari data-data literatur sebagai proses studi preseden yang mendukung perancangan Gedung MRPB di Manokwari.

3. Analisis

Menafsirkan data lapangan dan literatur yang kemudian dipadukan dengan konsep arsitektur Neo vernakular sehingga diperoleh kesimpulan dan wujud rancangan Gedung MRPB.



1.5.2. Tata Langkah



Gambar I.1. Skema Kerangka Pikiran
(Sumber: Analisis Penulis)

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang eksistensi proyek, latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, lingkup studi, metode studi, dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PROYEK

Penjabaran mengenai pengertian, sejarah, struktur organisasi, dan tugas Majelis Rakyat Papua Barat; dan persyaratan, kebutuhan/tuntutan, peraturan pemerintah, standar-standar perencanaan dan perancangan, serta teori-teori lain mengenai gedung kantor pemerintahan.

BAB III. TINJAUAN WILAYAH

Menguraikan wilayah (lokasi) perancangan Gedung Majelis Rakyat Papua Barat, dalam hal ini Kabupaten Manokwari. Pembahasan berisi tinjauan mengenai kondisi geografis dan geologis, kondisi klimatologis, kondisi sosial budaya, kebijakan tata ruang kawasan, kebijakan tata bangunan, kondisi elemen perkotaan, kondisi sarana dan prasarana, dan kondisi kawasan.

BAB IV. TINJAUAN PUSTAKA LANDASAN TEORETIKAL

Berisi tentang teori-teori mengenai studi bentuk dan massa bangunan, mengenai tata ruang, serta ulasan teori mengenai konsep tata ruang dan bentukan massa dengan pendekatan Neo Vernakular dan Arsitektur Tradisional Papua.

BAB V. ANALISIS PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

Berisi tentang analisis-analisis yang dipergunakan dalam perencanaan dan perancangan Gedung Majelis Rakyat Papua Barat di Manokwari meliputi analisis site, program kegiatan, analisis kebutuhan ruang, hubungan antar ruang, perancangan tata ruang, penampilan bangunan, dan analisis perlengkapan dan kelengkapan bangunan.

BAB VI. KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

Berisi tentang konsep dasar perencanaan dan perancangan bangunan Gedung Majelis Rakyat Papua Barat di Manokwari yang merupakan hasil dari analisis untuk diterapkan dalam bentuk fisik bangunan.